

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
OLEH PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN TANAH
UNTUK EKOWISATA BERKELANJUTAN DI KALURAHAN PUCUNG,
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

RIZVI AMALINDA LUPITANINGRUM

NIT. 22314257

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Kalurahan Pucung, Girisubo Subdistrict, Gunungkidul Regency, has rich natural and cultural potential that has been directed toward the development of sustainable community-based ecotourism on village treasury land (Tanah Kas Desa). This study aims to identify the forms of community empowerment programs implemented by the village government, the constraints encountered, and the solutions applied in utilizing village land for ecotourism development. This study uses a qualitative method with a case study approach, with data collected through semi-structured interviews and documentation, then analysed using thematic analysis guided by the Asset-Based Community Development (ABCD) and policy implementation frameworks. The results show that empowerment is implemented through four institutions: micro, small, and medium enterprises (MSMEs), the Village-Owned Enterprise (BUMDes), the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and Pucung Tourism Village (Dewi Purbo), with village treasury land serving as the productive asset base for agro-tourism, parking management, and homestays. Constraints identified include internal community dependency culture and uneven participation, weak institutional and financial accountability, and land-permit barriers related to Sultan Ground status together with limited youth human resources. The solutions applied include partnership-based capacity strengthening with universities and the tourism agency, a phased and asset-based infrastructure development strategy prioritising the most ready destination, and diversification of funding sources to reduce dependency on provincial special funds.

Keywords: *community empowerment, village treasury land, sustainable ecotourism*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Asset-Based Community Development (ABCD).....	11
2. Pemberdayaan masyarakat.....	12
3. Implementasi Program.....	14
4. Pemerintah desa.....	15
5. Ekowisata.....	16

6. Pemanfaatan tanah.....	17
C. Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi atau Objek Penelitian	22
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	23
1. Informan	23
2. Teknik pengambilan sampel.....	24
D. Definisi Operasional Konsep	25
1. Pemberdayaan Masyarakat	25
2. Implementasi Program.....	25
3. Pemerintah desa.....	26
4. Ekowisata.....	26
5. Pemanfaatan tanah.....	27
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
1. Jenis Dan Sumber Data	28
2. Data Primer	28
3. Data Sekunder.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data.....	31
1. Tahap telaah awal.....	31
2. Abstraksi dan reduksi data	32
3. Pengorganisasian data.....	32
4. Tahapan distribusi	33
5. Tahap akhir	33

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	35
A. Kondisi Gegografis Kalurahan Pucung	35
B. Kondisi Demografi Dan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	36
C. Potensi Sumber Daya Alam.....	39
1. Formasi Batuan	40
2. Jenis tanah.....	40
3. Kondisi Hidrologi.....	40
4. Curah Hujan dan Iklim	41
5. Kondisi Lereng dan Topografi	41
D. Profil Tanah Kas Desa Di Kalurahan Pucung	42
E. Struktur Pemerintahan Kalurahan Dan Kelembagaan Desa.....	43
F. Potensi Wisata	45
1. Padukuhan Wotawati.....	47
2. Padukuhan Ngreyung	48
3. Padukuhan Traju.....	48
4. Padukuhan Karang Tengah.....	49
5. Padukuhan Bengele	50
6. Padukuhan Pucung	51
7. Padukuhan Pakel Kopel	52
8. Padukuhan Nujo	53
9. Padukuhan Wonotoro	54
10. Padukuhan Kandri.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	57
A. Bentuk Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat	57
1. Pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM.....	63

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes	64
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokdarwis	66
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata Pucung (Dewi Purbo).....	68
B. Kendala Yang Dihadapi	71
1. Kendala Internal dari Dalam Masyarakat.....	77
2. Kendala Struktural dan Institusional	80
3. Kendala Sumber Daya.....	82
C. Solusi Yang Ditawarkan.....	86
1. Solusi atas Kendala Internal dari Dalam Masyarakat	90
2. Solusi atas Kendala Struktural dan Institusional	93
3. Solusi atas Kendala Sumber Daya dan Lingkungan	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
1. Bentuk Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat. 99	
2. Kendala dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat	99
3. Solusi yang diterapkan	100
B. Saran	101
1. Pemerintah kalurahan Pucung	101
2. Pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Pucung	102
3. BUMDes Kalurahan Pucung	103
4. Masyarakat di Kalurahan Pucung	104
5. Pemerintah Gunung Kidul dan Provinsi DIY	105
6. Kementrian ATR/BPN	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) digunakan dalam Pembangunan Indonesia saat Ini, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini di tingkat desa diterjemahkan melalui program SDGs Desa yang berkelanjutan mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan terutama dalam tata kelola yang terpadu dan partisipatif (Setiya et al., 2024).

Namun Implementasi SDGs Desa ini menekankan pentingnya peran pemerintah kalurahan dan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lokal (Boekoesoe & Maksun, 2022). Dalam Konteks pedesaan di Indonesia berbasis agraria, permasalahan pembangunan ini masih sering berkaitan dengan ketebatasan akses ekonomi, dan rendahnya diversifikasi mata pencaharian, serta belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal, termasuk lahan desa.

Kondisi ini tercermin secara nyata di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Secara historis, masyarakat Kalurahan Pucung merupakan komunitas agraris yang secara turun-menurun menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya budidaya cabai dan tanaman pangan lain yang sesuai dengan karakteristik lahan karst di sana. Selama sepuluh tahun, mata pencaharian masyarakat relatif homogen dan bertumpu pada pertanian sebagai satu-satunya sumber penghidupan, dengan diversifikasi ekonomi yang minim.

Titik balik menuju sektor pariwisata baru mulai dirintis pada tahun 2023, ketika Pemerintah Kalurahan Pucung mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang melibatkan perwakilan dari berbagai padukuhan, meskipun legitimasi formalnya melalui Surat Keputusan Gubernur baru diperoleh

pada akhir tahun 2024. Sejak saat itu, potensi wisata alam dan budaya yang selama ini belum tergarap secara optimal seperti situs Bengawan Solo Purba, Pantai Srakung, Pantai Ngungap, Pantai Sadeng, Goa Putri, Goa Kalongan, Telaga Pakel Rubuh, hingga Pasarean Ki Jaka Sura mulai dikembangkan secara bertahap sebagai destinasi ekowisata, dengan tetap mengintegrasikan aktivitas pertanian, peternakan, dan keseharian masyarakat sebagai bagian dari daya tarik wisata itu sendiri. Hingga saat penelitian ini dilakukan (2026), Kalurahan Pucung berada pada masa transisi dari desa berbasis pertanian menuju desa dengan orientasi ekonomi ganda-pertanian dan pariwisata yang berjalan beriringan. Proses ini belum sepenuhnya tuntas, mengingat perubahan pola pikir masyarakat dari petani menjadi pelaku wisata membutuhkan waktu dan pendampingan yang intensif, sebagaimana terlihat dari berbagai kendala adaptasi SDM yang masih dihadapi hingga kini.

Maka dari itu, Ketergantungan masyarakat desa pada sektor pertanian tradisional juga menyebabkan produktivitas ekonomi relatif rendah dan rentan terhadap degradasi lingkungan juga keterbatasan inovasi pengelolaan sumberdaya (Taufik Suprianto, 2022). Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi pedesaan masih memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola sumber daya lahan dan juga keberlanjutan lingkungan hidup (Yunas et al., 2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, yang menekankan peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa, adalah salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mengatasi masalah tersebut (Nurhidayati et al., 2024).

Selain itu, tujuan dari pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal (Nurhidayati et al., 2024). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Tanah Kas Desa merupakan pilihan strategis karena mampu meningkatkan diversifikasi ekonomi sambil mempertahankan kelestarian lingkungan (Jocom & Kameo, 2024).

Ekowisata berbasis masyarakat berfokus pada peningkatan pendapatan, peningkatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Jocom & Kameo, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pemerintah kalurahan menerapkan program

pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan tanah untuk ekowisata berkelanjutan, khususnya terkait kinerja kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan tata kelola sumber daya alam.

Meskipun Kalurahan Pucung memiliki potensi dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk mendukung pengembangan ekowisata dan peningkatan ekonomi masyarakat, implementasi program pemberdayaan masyarakat masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Program yang telah berjalan belum sepenuhnya dapat menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan dilakukan, bagaimana keterlibatan masyarakat dibangun, serta sejauh mana kelembagaan lokal berperan dalam menjaga keberlanjutan program tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata, atau pemanfaatan tanah desa secara terpisah, sementara kajian yang menghubungkan implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Pucung dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah Kalurahan Pucung dan masyarakat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai ekowisata berkelanjutan?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk ekowisata di kalurahan pucung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk dan jenis program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung dalam pemanfaatan tanah untuk ekowisata berkelanjutan, termasuk program pelatihan, pendampingan dan pembentukan kelembagaan lokal.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk ekowisata berkelanjutan
3. Merumuskan rekomendasi Perbaikan Berbasis Temuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan tanah untuk ekowisata berkelanjutan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kementerian ATR/BPN
 - a. Menjadi bahan masukan dalam penguatan kebijakan pemanfaatan tanah berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Memberikan gambaran empiris mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa secara legal dan berkelanjutan.
 - c. Mendukung implementasi program asset reform dan acces reform dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
 - d. Sebagai referensi pada pengembangan kebijakan pertanahan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
2. Bagi Lembaga Pendamping (STPN, LSM, dan Intitusi Lainnya)
 - a. Menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendamping pemberdayaan masyarakat desa berbasis pemanfaatan tanah dan ekowisata berkelanjutan.
 - b. Memberikan informasi mengenai kendala dan tantangan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk ekowisata berkelanjutan.
 - c. Menjadi referensi dalam pengatan kelembagaan lokal, khususnya pokdarwis dan kelompok masyarakat pengelola wisata.
3. Bagi Peneliti
 - a. Memperkuat pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai implementasi

kebijakan pemberdayaan masyarakat ditingkat kalurahan.

- b. Memberi pengalaman penelitian lapangan yang komprehensif sebagai bekal akademik dan profesional.
- c. Menjadi refrensi penelitian selanjutnya di bidang pertanian, pariwisata, dan pembangunan berbasis masyarakat.

4. Bagi Kalurahan Pucung

- a. Sebagai evaluasi kepada Pemerintah Kalurahan Pucung mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan.
- b. Menjadi acuan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat masyarakat berdasarkan penggunaan sumber daya desa.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kalurahan Pucung mengenai pentingnya pemanfaatan Tanah Kas Desa secara partisipatif, produktif, dan berwawasan lingkungan.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan lokal, seperti Pokdarwis, dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kalurahan Pucung, dapat disimpulkan bahwa

1. Bentuk Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Pucung dijalankan melalui dua bidang utama yang saling melengkapi, yaitu ekonomi dan pariwisata. Pada bidang ekonomi, program diwujudkan melalui sosialisasi pengembangan usaha berbasis potensi lokal, pelatihan pengemasan produk, pendampingan pengurusan izin usaha, serta sertifikasi halal dan BPOM, dengan BUMDes berperan mengelola aset Tanah Kas Desa melalui pertanian terpadu, budidaya ikan, peternakan, dan penjualan gas LPG, sekaligus berkolaborasi dengan Pokdarwis dalam pengelolaan tiket dan parkir wisata. Sementara itu, pada bidang pariwisata, Pokdarwis menjalankan pelatihan pelayanan (*customer service*) dan pemaketan wisata yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, sedangkan Desa Wisata Pucung mengembangkan konsep ekowisata berkelanjutan yang menempatkan kehidupan keseharian masyarakat di bidang pertanian, peternakan, dan tradisi budaya sebagai daya tarik utama; program parkir wisata dan homestay yang dikelola langsung oleh masyarakat pun telah terbukti menghasilkan pendapatan nyata bagi warga yang terlibat aktif.

2. Kendala dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Pucung dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kendala internal masyarakat, meliputi budaya ketergantungan yang masih tinggi terhadap pemerintah kalurahan, ketidakmerataan partisipasi dan akses informasi antarpadukuhan, serta

keterbatasan tingkat pendidikan dan keterampilan SDM yang menjadi hambatan dalam pengelolaan program secara mandiri. Kedua, kendala struktural dan institusional, yang tercermin dari lemahnya kapasitas kelembagaan—Pokdarwis baru memperoleh SK Gubernur pada akhir 2024, laporan keuangan BUMDes belum tertib, serta koordinasi lintas lembaga yang masih bersifat informal—ditambah pendampingan di bidang kepariwisataan yang hanya dikuasai segelintir perangkat kalurahan sehingga distribusinya belum merata. Ketiga, kendala sumber daya dan lingkungan, yang paling nyata terlihat dari persoalan perizinan lahan Sultan Ground (SG) yang mengakibatkan batalnya pembangunan senilai Rp750 juta di Pantai Ngungap, diperparah oleh fenomena urbanisasi yang menipiskan ketersediaan SDM muda di desa, serta keterbatasan infrastruktur fisik dan tingginya ketergantungan pada Dana Keistimewaan Provinsi yang menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan program.

3. Solusi yang diterapkan

Sejumlah langkah strategis ditempuh untuk memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Pucung. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan yang difasilitasi Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti ISI Surakarta dan UGM untuk pengembangan atraksi wisata berbasis budaya lokal. Selain itu, pengembangan ekowisata berkelanjutan diarahkan dengan menempatkan aktivitas komunitas sebagai produk wisata utama, dengan mengacu pada model Desa Penglipuran, Bali, sebagai inspirasi. Untuk mengatasi kendala pertanahan, dilakukan pengalihan fokus pembangunan fisik ke kawasan yang bebas dari persoalan Sultan Ground, seperti tanah milik warga di Wotawati, sementara negosiasi jangka panjang dengan pihak Kasultanan terus diupayakan. Di sisi ekonomi, produk UMKM diintegrasikan ke dalam ekosistem pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi ganda dari sektor wisata. Sebagai pelengkap, diterapkan pula evaluasi berbasis digital untuk menangkap masukan pengunjung dan memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata berkelanjutan di Kalurahan Pucung, sebagai berikut.

1. Pemerintah kalurahan Pucung

Pemerintah Kalurahan Pucung sebagai aktor utama penggerak program pemberdayaan disarankan untuk melakukan beberapa langkah strategis berikut:

- a. Menyusun kalender pemberdayaan tahunan yang merata. Pemerintah perlu menyusun jadwal pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang mencakup seluruh padukuhan secara terencana dan merata setiap tahunnya. Ketidakteraturan informasi dan akses program yang dikeluhkan oleh Pak RT, yang mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan, menunjukkan perlunya sistem distribusi program yang lebih inklusif dan terstruktur. Setiap padukuhan hendaknya memiliki minimal satu perwakilan yang aktif terlibat dalam program pemberdayaan dan bertanggung jawab menyebarluaskan informasi kepada warganya.
- b. Memprioritaskan perbaikan tata kelola keuangan BUMDes. Laporan keuangan BUMDes yang belum tertib, sebagaimana diakui oleh Ketua Pokdarwis, merupakan kelemahan mendasar yang perlu segera diatasi. Pemerintah kalurahan perlu memfasilitasi pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi pengurus BUMDes dan mewajibkan penyusunan laporan keuangan periodik minimal setiap tiga bulan. Transparansi keuangan merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan desa yang tidak boleh diabaikan.
- c. Membangun sistem pemetaan status lahan sebelum perencanaan pembangunan. Kasus batalnya anggaran 750 juta rupiah di Pantai Ngungap akibat kendala izin lahan Sultan Ground perlu dijadikan pelajaran institusional yang mengubah prosedur perencanaan

pembangunan di Kalurahan Pucung. Ke depan, setiap rencana pembangunan fisik destinasi wisata harus diawali dengan due diligence lahan yang komprehensif, termasuk verifikasi status SG, Tanah Kas Desa, dan tanah milik warga, bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Hal ini penting mengingat posisi Kalurahan Pucung sebagai bagian dari kawasan dengan kerangka regulasi pertanahan yang spesifik.

- d. Memformalkan kemitraan dengan institusi eksternal. Kerja sama yang sudah terjalin dengan ISI Surakarta, UGM, dan Dinas Pariwisata perlu di lembagakan melalui perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) yang menjalin keberlanjutan dukungan di luar siklus pergantian pejabat. Kemitraan yang hanya bersifat informal dan bergantung pada relasi personal sangat rentan terputus ketika terjadi perubahan kepemimpinan di salah satu pihak.
- e. Mengembangkan kader pendamping internal dari masyarakat. Mengingat bahwa pengetahuan mendalam tentang pariwisata saat ini hanya dimiliki oleh segelintir perangkat kalurahan, pemerintah kalurahan perlu secara aktif mengidentifikasi dan mengembangkan kader-kader pendamping wisata dari dalam komunitas sendiri, terutama dari kalangan muda yang masih tinggal di desa. Program magang atau studi banding ke desa wisata yang sudah maju, seperti Desa Penglipuran di Bali, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat proses transfer pengetahuan.

2. Pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Pucung

Pokdarwis dan pengelola Desa Wisata Pucung sebagai lembaga yang langsung berhadapan dengan pengunjung dan masyarakat di sarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Mempercepat perluasan SOP ke seluruh destinasi wisata. SOP layanan wisata yang sudah berhasil diterapkan di Wotawati perlu segera direplikasi ke destinasi-destinasi lain, terutama Pantai Srakung yang saat ini masih dikelola tanpa mekanisme yang terstandar. Proses replikasi paling efektif dilakukan melalui pendekatan peer learning, yaitu mengajak pengelola destinasi lain

untuk mengobservasi langsung praktik pengelolaan di Wotawati sebelum merancang SOP yang sesuai dengan konteks masing-masing destinasi.

- b. Mendokumentasikan praktik terbaik sebagai modul pembelajaran. Seluruh pengalaman, prosedur, dan pelajaran yang sudah diakumulasi dalam pengelolaan Wotawati perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai modul pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih anggota baru Pokdarwis di masa mendatang. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai institutional memory yang menjaga keberlangsungan pengetahuan organisasi meskipun terjadi pergantian pengurus.
- c. Mengaktifkan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan periodik. Mekanisme evaluasi yang saat ini masih bersifat informal dan situasional perlu dilengkapi dengan forum evaluasi periodik yang terjadwal, misalnya setiap bulan, dengan agenda yang terstruktur dan notulensi yang tercatat. Forum ini memastikan bahwa isu-isu operasional dapat ditangani secara sistematis sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
- d. Mengembangkan paket wisata yang terdiferensiasi. Untuk memperluas pasar dan meningkatkan lama kunjungan wisatawan, Pokdarwis dan Desa Wisata perlu mengembangkan paket wisata yang lebih beragam, termasuk paket wisata budaya dengan atraksi tari penyambutan khas Wotawati, serta paket wisata alam di Goa Putri dan Goa Kalongan. Diversifikasi paket wisata ini sekaligus membuka peluang lebih banyak warga dari berbagai padukuhan untuk terlibat aktif sebagai pelaku wisata.

3. BUMDes Kalurahan Pucung

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola berbagai unit usaha disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut.

- a. Menyusun rencana bisnis tertulis untuk setiap unit usaha. BUMDes perlu segera menyusun rencana bisnis tertulis untuk setiap unit usaha yang dijalankan, mencakup proyeksi pendapatan, rencana pengeluaran, strategi pemasaran, dan target capaian yang

terstruktur. Rencana bisnis ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional, tetapi juga menjadi syarat penting ketika mengajukan kerja sama dengan pihak perbankan atau program hibah dari pemerintah.

- b. Memperkuat peran BUMDes sebagai agregator produk UMKM lokal. BUMDes memiliki posisi strategis untuk menjadi agregator yang mengonsolidasikan dan memasarkan produk-produk UMKM dari seluruh padukuhan kepada wisatawan dan pasar yang lebih luas. Langkah konkret yang dapat diambil meliputi pembangunan gerai produk lokal di area wisata Wotawati, pengembangan katalog produk digital, serta penjajakan kerja sama distribusi dengan pelaku usaha regional.
- c. Mendiversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan BUMDes pada sumber pendanaan dari anggaran kalurahan dan Dana Keistimewaan Provinsi perlu dikurangi secara bertahap dengan mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, termasuk kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR, skema kredit usaha dari lembaga keuangan seperti BRI Unit Desa, serta partisipasi dalam program hibah pengembangan BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Masyarakat di Kalurahan Pucung

Masyarakat Kalurahan Pucung sebagai subjek utama sekaligus penerima manfaat program pemberdayaan disarankan untuk aktif mengambil peran berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Masyarakat, terutama generasi muda yang masih tinggal di desa, perlu menyadari bahwa setiap program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kalurahan merupakan peluang nyata untuk meningkatkan kapasitas diri dan membuka sumber pendapatan baru. Keputusan untuk terlibat aktif atau hanya menjadi penonton akan menentukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dari berkembangnya sektor pariwisata di Kalurahan Pucung.

- b. Memanfaatkan pelatihan sebagai investasi jangka panjang. Setiap program pelatihan yang ditawarkan, mulai dari pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, pengemasan produk UMKM, hingga pengembangan atraksi budaya, hendaknya dipandang sebagai investasi dalam peningkatan nilai diri yang manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Sikap skeptis atau pasif terhadap program pemberdayaan hanya akan memperpanjang kondisi ketergantungan yang selama ini menjadi hambatan terbesar kemajuan komunitas.
- c. Menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata utama. Keunggulan Kalurahan Pucung sebagai destinasi ekowisata terletak pada keindahan alam dan keaslian lingkungannya yang masih terjaga. Masyarakat perlu memahami bahwa kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan investasi bersama yang nilai ekonominya akan semakin meningkat seiring berkembangnya sektor pariwisata. Praktik pengelolaan sampah yang baik, pelestarian vegetasi lokal, dan pencegahan pencemaran air menjadi tanggung jawab setiap individu warga.

5. Pemerintah Gunung Kidul dan Provinsi DIY

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Pemerintah Provinsi DIY sebagai pihak yang memiliki kewenangan regulatif dan kapasitas fiskal yang lebih besar disarankan untuk memberikan dukungan berikut:

- a. Mempercepat proses perizinan pemanfaatan lahan Sultan Ground untuk kepentingan pemberdayaan. Persoalan perizinan lahan SG yang menghambat pembangunan Pantai Ngungap merupakan isu regulatif yang memerlukan solusi sistemik dari tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi DIY melalui instansi yang berwenang perlu mengembangkan mekanisme perizinan yang lebih responsif dan berpihak kepada program pemberdayaan masyarakat, sehingga kalurahan-kalurahan yang memiliki potensi wisata di atas lahan SG tidak terus-menerus menghadapi kendala yang sama. Meningkatkan alokasi pendampingan teknis dari dinas pariwisata. Dinas pariwisata

- Kabupatten Gunung Kidul perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pendampingan teknis kepada Pokdarwis dan Desa Wisata Pucung, terutama dalam hal standarisasi layanan, pengembangan paket wisata, dan strategis pemasaran digital. Pendampingan ini perlu bersifat kontinyu dan tidak hanya terbatas pada kegiatan pelatihan insidental.
- b. Meningkatkan alokasi pendampingan teknis dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pendampingan teknis kepada Pokdarwis dan Desa Wisata Pucung, terutama dalam hal standardisasi layanan, pengembangan paket wisata, dan strategi pemasaran digital. Pendampingan ini perlu bersifat kontinu dan tidak hanya terbatas pada kegiatan pelatihan yang bersifat insidental.
 - c. Mendukung infrastruktur fisik yang menjadi persyaratan aksesibilitas destinasi. Beberapa destinasi wisata di Kalurahan Pucung masih memerlukan pembangunan infrastruktur akses yang signifikan. Pemerintah kabupaten perlu mempertimbangkan alokasi anggaran infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aksesibilitas destinasi-destinasi wisata yang sudah memiliki kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan, sehingga investasi dalam pemberdayaan SDM yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia karena wisatawan tidak dapat menjangkau lokasi tersebut.

6. Kementrian ATR/BPN

Dalam konteks pertanahan yang menjadi fokus utama penelitian ini, peneliti merumuskan saran khusus kepada kementrian ATR/BPN sebagai berikut:

- a. Memperkuat program pemberdayaan legal pemanfaatan Tanah Kas Desa. BPN Kabupaten Gunungkidul perlu memberikan pendampingan hukum yang lebih aktif kepada pemerintah kalurahan dalam menyusun regulasi dan perjanjian pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk kegiatan ekowisata, termasuk penyusunan dokumen legal yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan status hukum pemanfaatan lahan merupakan prasyarat fundamental bagi keberlangsungan investasi dan program pemberday

aan yang dibangun di atasnya.

- b. Mengintegrasikan data pertanahan desa dengan perencanaan ekowisata. BPN perlu mendorong penerapan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi di tingkat kalurahan, sehingga pemerintah Kalurahan memiliki akses mudah terhadap data status lahan yang akurat dan termutakhir. Ketersediaan data ini akan memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan mengurangi risiko investasi yang terbuang akibat permasalahan perizinan yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal.
- c. Mendukung penguatan asset reform dan access reform berbasis komunitas. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa melalui program ekowisata berkelanjutan merupakan salah satu wujud konkret dari program asset reform dan access reform yang selama ini menjadi agenda kebijakan Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, model pemberdayaan yang dikembangkan di Kalurahan Pucung layak dijadikan referensi dalam pengembangan kebijakan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang terintegrasi dengan sektor pariwisata di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat dirumuskan dari penelitian ini. Peneliti berharap bahwa temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Pucung, sekaligus menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Tanah Kas Desa dan pengembangan ekowisata berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Lurah, tantangan terbesar pemberdayaan bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau pembangunan fisik, melainkan pada membangun manusia dan komunitas yang percaya pada kekuatan dan aset yang dimilikinya sendiri. Itulah esensi terdalam dari pendekatan ABCD yang seharusnya terus menjadi ruh dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Kalurahan Pucung maupun di desa-desa lain di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rinto Dwiatmojo, Khairul Hisyam Kamarudin, & Yusni Nyura. (2023). Community Empowerment Program as A Sustainable Economic Strategy in Pela Tourism Village. *International Journal of Business and Technology Management*. <https://doi.org/10.55057/ijbtm.2023.5.s4.3>
- Ahmad Hidayatullah, Muhammad Rikzam Kamal, Izza Himawanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (22 C.E.). *Pemberdayaan Masyarakat berbasis Ekowisata (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Bangkok Menjadi Ekowisata “Taman Stambran” di Desa Tambangan Kec. Mijen Kota Semarang)*.
- Aristiono Nugroho, & sugiasih. (2022). Masterplan Kalurahan Pucung. Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209–218. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103>
- Brilian Moktar, & Ngih Aman Harja. (2024). Ekowisata Sawah: Strategi Peningkatan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan.
- Indiyati, D., Putri, R. K., & Iradianty, A. (2025). Pemberdayaan Manajemen Pariwisata di Desa Karang Sidemen untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(3), 119–123. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1211>
- Jocom, H., & Kameo, D. D. (2024). Community-Based Tourism: Transformasi Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Kelimutu Flores INDONESIA. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, 2(2), 116–124. <https://doi.org/10.61696/juparita.v2i2.396>
- Kamelia, L., Sururie, R. W., Aziz, R., & Martina, A. (2023). Empowerment of Ecotourism Village: Integration of Community Empowerment and Asset-Based Community Development (ABCD) Method. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 23(1), 99–118. <https://doi.org/10.21580/dms.2023.231.14463>
- Muhamad Firdaus Kurniadin, & Wawanudin. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata Gunung Dago di Desa Dago Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.

- Nasution, M., & Wardani, D. K. (2023). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pembangunan Desa Wisata Berbasis Ramah Lingkungan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 5616. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17849>
- Nurhidayati, N., Purwanti, D., & Dharmakarja, I. (2024). Penguatan Sustainable Development Goals Desa di Kabupaten Belu. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.20904>
- Pudyatmoko, S., Fandeli, C., Martani, W., Konservasi Sumber Daya Hutan, D., Kehutanan, F., Gadjah Mada, U., Ilmu Kehutanan, J., & masuk, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata Local Communities Participation in Ecotourism Development HASIL PENELITIAN Riwayat Naskah. In *Jurnal Ilmu Kehutanan* (Vol. 14). <https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt>
- Rahayu, H. A., Fatmawati, N., Usami, R. W., Dari, F. U., Alhada, M., Habib, F., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2022). Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. 4(1).
- Setiya, T., Hadiwibowo, Y., Raharjo, T., Publik, A. S., Keuangan, P., & Stan, N. (2024). Mengelola Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penyusunan Peraturan Desa Berbasis “Sdgs Desa.” 5(2), 199–215.
- Suwito, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101. DOI: 10.15294/jnece.v4i1.31319.
- Sutikno, B., Hastari, S., & Oktavia, Y. (2023). Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Pengembangan Menuju Desa Wisata Patuguran (Studi Kasus Pada Desa Wisata Patuguran). In *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 2, Number 6). <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Taufik Suprianto. (2022). Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang.
- Ubaidillah, M., Hazizi, S., Warahmah, M., Azwira, A., & Birata, H. D. (2025).

Pendekatan Asset-Based Community Development (Abcd)

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Labuhan Kertasari Sumbawa Barat.

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/DJCE/issue/view/175> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016. (n.d.).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024. (n.d.).

Wahyu Ningsih, S., & Atika Putri, A. (2025). Implementasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pengembangan Ekowisata Embung Terpadu Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak : Persepektif Kolaborasi Pentahelix. NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS, 2, 224–234.

Yulianto, Fahmi, T., D. Meilinda, S., A. Hidayati, D., & Inayah, A. (2021). Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah. Bakti Budaya, 4(2), 161–172. <https://doi.org/10.22146/bakti.2418>

Yunas, N. S., Ramadhan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. Surya Abdimas, 8(1), 93–105. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441>

Undang-Undang

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016, n.d.) (UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA 3 TAHUN 2024, n.d.)